



RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENJA PERUBAHAN

2025

**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. LAMONGAN**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena rohmat dan hidayahNya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan atas pengarahan dan pembinaannya dan Seluruh jajaran Pejabat Dinas Perhubungan atas masukan dan kerjasamanya yang baik selama ini.

Selanjutnya kami berharap, agar Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Kami sadar bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini kami buat, semoga ada guna dan manfaatnya.

Lamongan, Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. DIANTO HARI WIBOWO.MIP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760410 199412 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang mengacu pada RKPD, Renja Perubahan Dinas Perhubungan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Perubahan Dinas Perhubungan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat disusun dengan tahapan. :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir dan
- e. Penetapan,

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (RENJA-SKPD) Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 program. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
TRIBUNAN I

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan.
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 - c. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2025, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2025-2029 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Untuk pencapaian kinerja Dinas perhubungan yang lebih maksimal maka dibutuhkan adanya Implementasi tindakan seperti evaluasi secara berkala pada penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian renstra bisa tercapai dengan maksimal.

Evaluasi Program Tahun 2025

Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melalui 2 (Dua) program dan 16 (Enam Belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.500.088.484 dan terealisasi pada semester I sebesar Rp. 7.866.485.937 (19,9%) . Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.885.800,00 yang digunakan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.540.045 (10,8%)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.705.895.324,02 yang digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan realisasi keuangan sebesar 1.650.108.587,00 (21,2%)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.640.000,00 yang digunakan untuk Belanja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan ralisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %)
4. Administrasi umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 454.080.300,00 yang digunakan untuk belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.025.700,00 yang digunakan untuk belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.037.732.400,00 yang digunakan untuk belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.076.161.179,00 (26,04 %) terserap sesuai kebutuhan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.695.641,00 yang digunakan untuk belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan , Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya , Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.173.900,00 (6,7 %).

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.444.479.288,00 yang digunakan untuk Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.067.286.226,00 (19,9 %)
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.486.431,00 yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Terminal, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %).
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.086.600,00 yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %)
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.310.600,00 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %)

5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.545.100,00 yang digunakan untuk Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.216.000 (17,45 %)
6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.497.400,00 yang di gunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, penetapan tata kelola andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %)
7. Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 156.727.900,00 yang digunakan untuk pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 (- %)
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (- %).

Sedangkan Untuk capaian Kinerja pada tahun Berjalan 2025 kami perkirakan Bahwa Pelaksanaan Program/ Kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan pencapaian terget pencapaian kinerja tahunan dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, dikarenakan rencana kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (terlampir)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Di atas,
Disimpulkan Sebagai Berikut :

1. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan didukung oleh 2 Program dan 16 kegiatan yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target kinerja program yang telah tercapai meliputi :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mendukung Pelaksanaan dari Program yang ada Dinas Perhubungan memiliki 16 kegiatan dengan 34 sub kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah terealisasi dengan target yang telah di tetapkan

Faktor Penyebab Terpenuhinya Realisasi Program / Kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan yang telah di tetapkan adalah :

- a. Adanya perancangan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat di capai sesuai harapan.
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan, yakni antara lain :

1. Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PERDA Nomor 11 Tahun 2016).
2. Jenis Pelayanan Parkir Berlangganan (PERDA Nomor 15 Tahun 2010).
3. Jenis Pelayanan Kartu Pengawasan (KPS)/ Ijin Trayek (PERDA Nomor 26 Tahun 2010).

Adapun prosedur persyaratan pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan pelayanan, baik administrasi maupun teknis.
- b. Biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

- c. Waktu penyelesaian pelayanan.
- d. Spesifikasi produk/pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.
- e. Prosedur pengajuan layanan yang harus diikuti oleh setiap pelanggan.
- f. Prosedur proses penyelesaian layanan.
- g. Kompetensi masing-masing petugas yang terlibat dalam proses.
- h. Sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan SOP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan
(Terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu Strategis merupakan suatu bagian penting dalam tercapainya tujuan dari suatu OPD. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan suatu masalah yang lebih besar dan dalam jangka panjang akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan Pelayanan dan demi terwujudnya transportasi yang tertib, lancar dan aman maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan serta meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan antara lain :

Pertumbuhan jumlah kendaraan disetiap kota/kabupaten semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat kota/kabupaten cenderung padat akan kendaraan dan tidak beraturan. Kehadiran sistem teknologi CCTV memiliki kecerdasan buatan sangat membantu manajemen lalu lintas untuk melakukan pengaturan disamping itu juga dengan adanya teknologi ini membuktikan perhubungan telah bersiap mengikuti era inovatif revolusioner dalam menyambut revolusi industry, adapun Sasaran yang dicapai adalah :

1. Memberikan informasi data pelanggaran setiap harinya kepada kepolisian yang nantinya akan disambungkan ke program nasional ETLE.
2. Mendapatkan data volume kendaraan yang up to date untuk manajemen lalu lintas
3. Menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di kabupaten Lamongan.
4. Salah satu unsur menuju smart city
5. Mempermudah dalam melakukan pemantauan real time informasi pendaftaran mudik gratis

Dengan demikian maka diharapkan adanya dukungan kebijakan dan pendanaan yang continue dari pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan Hal Tersebut. Sehingga apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka dapat membantu dalam mewujudkan transportasi yang tertib, lancar dan aman sehingga tercapainya visi misi kepada daerah, yaitu visi Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan dan misi 3 yaitu Mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Proses Penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap rencana kerja (RENJA) tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin di capai indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten lamongan, disamping itu juga dokumen rencana kerja atau renja tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana capaiannya, melalui dokumen rencana kerja (renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi. LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun Daerah Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi.

TABEL 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lamongan
(Terlampir)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra dinas perhubungan kepala daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Arah Kebijakan :

- Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
- Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
- Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
- Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan
- Arah kebijakan :
- Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
 - Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
 - Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, yaitu:

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan

Indikator :

Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator : Persentase peningkatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas

- Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Visi yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

A. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Lamongan, maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 yakni: “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Berkelanjutan” Target utama visi pembangunan periode 2025-2029 adalah mewujudkan kejayaan dan kelanjutan Kabupaten Lamongan. Kejayaan yang dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya Lamongan Sebagai Kabupaten Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan Berkelanjutan Adalah Suatu VISI “ TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN BERKELANJUTAN” Kondisi Lamongan Yang Semakin Merata Pelaksanaan Pembangunan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakatnya Serta Semakin Menurun Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan arah pembangunan kemana Dinas Perhubungan di masa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan atas azas otonomi, sehingga dalam memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan dan ketepatan data public service sangat dibutuhkan.

Sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas- tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.

Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

B. Misi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 3 „**‘Membangun Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan’**”. Upaya untuk mencapai Misi 3, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan**.

Untuk Mendukung Visi Dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan Program Dan Kegiatan Sebagai Berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan sbb:
 - 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan jumlah anggaran Rp. 117.885.800,00 dengan sub kegiatan:
 - 1.1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan total anggaran Rp. 49.364.000,00

- 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 68.521.800,00
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan jumlah anggaran Rp. 7.705.895.324,02,00 Dengan sub kegiatan:
 - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 7.643.171.140,02,00
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran Rp. 20.664.200,00
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran dengan anggaran Rp. 42.059.984,00
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi dengan jumlah anggaran Rp. 21.640.000,00 Dengan sub kegiatan:
 - 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan indikator jumlah pakaian lapangan yang terbeli dengan total anggaran Rp. 0
 - 3.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan indikator jumlah ASN yang mengikuti diklat dengan total anggaran Rp. 21.640.000,00
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan:
 - 4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator jumlah jasa perkantoran dengan total anggaran Rp. 29.976.900,00
 - 4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaran Rp. 54.606.700,00
 - 4.3 Penyediaan bahan logistic kantor dengan indikator jumlah barang pakai habis yang tersedia dengan total anggaran Rp. 45.565.600,00
 - 4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator jumlah barang pakai habis yang tersedia dengan total anggaran Rp. 166.633.600,00
 - 4.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator jumlah barang pakai habis yang tersedia dengan total anggaran Rp. 20.022.000,00
 - 4.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator jumlah barang pakai habis yang tersedia dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan total

anggaran Rp. 137.275.500,00

5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan:

- 5.1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator jumlah barang habis yang tersedia dan jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor dengan total anggaran Rp. 223.025.700,00

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan dengan sub kegiatan:

- 6.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah jasa perkantoran dengan total anggaran Rp. 237.092.000,00

- 6.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator Jumlah jasa perkantoran yang disediakan dengan total anggaran Rp. 3.800.640.400,00

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan:

- 7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan total anggaran Rp. 84.995.700,00

- 7.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan total anggaran Rp. 59.803.600,00

- 7.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan total anggaran Rp. 85.873.000,00

- 7.4 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan total anggaran Rp. 80.023.341,00

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

dengan kegiatan Sbb:

1. Kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota dengan sub kegiatan :

- 1.1 Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota dengan indikator jumlah penyuluhan bagi juru mudi dengan total anggaran Rp.10.000.000,00

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

dengan sub kegiatan sbb:

- 2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dengan total anggaran Rp.23.781.785.788,00
- 2.2 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dengan indikator jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan total anggaran Rp.1.662.693.500,00
3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan sbb:
 - 3.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan indikator jumlah pemeliharaan dan pengelolaan sarana terminal dengan total anggaran Rp. 206.486.431,00
4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan kegiatan sbb:
 - 4.1 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas Parkir dengan anggaran Rp. 170.086.600,00
5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan kegiatan sbb:
 - 5.1 Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen bukti lulus uji kendaraan dengan anggaran Rp. 25.000.000,00
 - 5.2 Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pengujian kendaraan bermotor dengan indikator kinerja jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara dengan anggaran Rp. 318.310.600,00
6. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sbb:
 - 6.1 Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota dengan indikator jumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 247.545.100,00
7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sbb:

- 7.1 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin dengan indikator kinerja Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi dengan anggaran Rp. 9.907.100,00
 - 7.2 Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan anggaran Rp. 5.824.600,00
 - 7.3 Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andalalin dengan indikator kinerja Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi dengan anggaran Rp. 14.765.700,00
8. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan dengan sub kegiatan sbb:
 - 8.1 Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah operasional yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 156.727.900,00.
 9. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sbb:
 - 9.1 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 20.000.000
- Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan meliputi wilayah Kabupaten Lamongan baik itu untuk kegiatan penyuluhan, pengaturan, penertiban dan keselamatan lalu lintas serta Rehabilitasi dan pengadaan alat perlengkapan Jalan.

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025
(terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dishub. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dishub Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dishub Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dishub Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juni 2025
**Pit.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. DIANTO HARI WIBOWO. MIP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tb I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan							
2					3	4	5		6		7		8		9= 8/7 X 100%		10= 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan				31.269.962.219	82	Rp 12.870.955.165,02		Rp 2.755.983.711,00				Rp 34.007.745.930,00				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				133.666.100	21 Dokumen	Rp 117.885.800,00		Rp 12.540.045,00				Rp 146.206.145,00				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.240.550	13 Dokumen	Rp 49.364.000,00		Rp 10.659.045,00				47.899.595				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.425.550	8 Laporan	Rp 68.521.800,00		Rp 1.881.000,00				98.306.550				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				6.908.195.740	29 Laporan	Rp 7.705.895.324,02		Rp 1.650.108.587,00				Rp 8.558.304.327,00				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6.851.101.040	55 Orang/Bulan	Rp 7.643.171.140,02		Rp 1.639.496.087,00				8.490.597.127				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19.950.000	3 Laporan	Rp 20.664.200,00		Rp -				19.950.000				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				37.144.700	26 Laporan	Rp 42.059.984,00		Rp 10.612.500,00				47.757.200				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi				28.984.000	550 orang	Rp 21.640.000,00		Rp -				Rp 28.984.000,00				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	0	Rp -		Rp -				-				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28.984.000	550 orang	Rp 21.640.000,00		Rp -				28.984.000				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi				569.718.867	6 Kegiatan	Rp 454.080.300,00		Rp -				Rp 569.718.867,00				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19.711.800	1 Paket	Rp 29.976.900,00		Rp -				19.711.800				Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46.441.500	2 Paket	Rp 54.606.700,00		Rp -				46.441.500				Dinas Perhubungan

2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang				27.517.000	1 Paket	Rp	45.565.600,00		Rp	-			27.517.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				339.305.000	1 Paket	Rp	166.633.600,00		Rp	-			339.305.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22.280.000	1 Dokumen	Rp	20.022.000,00		Rp	-			22.280.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114.463.567	2 Laporan	Rp	137.275.500,00		Rp	-			114.463.567			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan				18.200.000	1 kegiatan	Rp	223.025.700,00								Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18.200.000	17 Unit	Rp	223.025.700,00		Rp	-			18.200.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang menunjang				23.320.444.512	2 Kegiatan	Rp	4.037.732.400,00		Rp	1.076.161.179,00			Rp 24.396.605.691,00			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19.582.481.048	4 Laporan	Rp	237.092.000,00		Rp	40.371.714,00			19.622.852.762			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				3.737.963.464	1 Laporan	Rp	3.800.640.400,00		Rp	1.035.789.465,00			4.773.752.929			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara				290.753.000	4 Kegiatan	Rp	310.695.641,00		Rp	17.173.900,00			Rp 307.926.900,00			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				110.070.000	2 unit	Rp	84.995.700,00		Rp	17.173.900,00			127.243.900			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36.819.000	5 Unit	Rp	59.803.600,00		Rp	-			36.819.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44.260.000	30 Unit	Rp	85.873.000,00		Rp	-			44.260.000			Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				99.604.000	1 Unit	Rp	80.023.341,00		Rp	-			99.604.000			Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan yang Berfungsi				2.404.938.550	96,43%	Rp	26.629.133.319,00		Rp	5.304.248.226,00			Rp 7.709.186.776,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ				-	1 kegiatan	Rp	10.000.000,00		Rp	-			Rp -			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	Rp	10.000.000,00		Rp	-			-			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia				1.704.547.600	2 Kegiatan	Rp	25.444.479.288,00		Rp	5.261.032.226,00			Rp 6.965.579.826,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				796.357.600	315 Unit	Rp	23.781.785.788,00		Rp	5.067.286.226,00			5.863.643.826			Dinas Perhubungan

2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	908.190.000	2169 Unit	Rp 1.662.693.500,00		Rp 193.746.000,00				1.101.936.000			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang tipe C yang terpelihara	95.315.000	2 Kegiatan	Rp 206.486.431,00		Rp -				Rp 95.315.000,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	0 unit	Rp -						-			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	95.315.000		Rp 206.486.431,00		Rp -				95.315.000			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	19.961.600	1 kegiatan	Rp 170.086.600,00		Rp -				Rp 19.961.600,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19.961.600	5 Laporan	Rp 170.086.600,00		Rp -				19.961.600			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang teruji secara berkala	193.641.350	2 Kegiatan	Rp 343.310.600,00		Rp -				Rp 193.641.350,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	2000 Dokumen	Rp 25.000.000,00		Rp -				50.000.000			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	143.641.350	9 unit	Rp 318.310.600,00		Rp -				143.641.350			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pelayanan lalu lintas dan ASDP	191.313.500	1 kegiatan	Rp 247.545.100,00		Rp 43.216.000,00				Rp 162.495.500,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	119.279.500	5 Laporan	Rp 247.545.100,00		Rp 43.216.000,00				162.495.500			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin yang disetujui	72.034.000	3 Kegiatan	Rp 30.497.400,00		Rp -				Rp 72.034.000,00			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	7.760.000	4 Laporan	Rp 5.824.600,00		Rp -				7.760.000			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07	05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan	-	1 Orang	Rp 9.907.100,00		Rp -				-			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	64.274.000	4 Laporan	Rp 14.765.700,00		Rp -				64.274.000			Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terlaksana	191.204.000	1 kegiatan	Rp 156.727.900,00		Rp -				Rp 191.204.000,00			Dinas Perhubungan

	2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				191.204.000	6 Laporan	Rp	156.727.900,00		Rp	-				191.204.000				Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia				8.955.500	1 kegiatan	Rp	20.000.000,00		Rp	-				Rp	8.955.500,00				Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8.955.500	1 Laporan	Rp	20.000.000,00		Rp	-				8.955.500				Dinas Perhubungan		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang berkualitas	0,70	0,75	0,80	0,85	0,41	0,4			
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,25	87,25	90,25	93,25	87,85	88,11			

TABEL 2.3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN LAMONGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lamongan	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	82	12.870.955.165	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	117.885.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	49.364.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	68.521.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	29 Laporan	7.705.895.324	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	7.643.171.140,02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	20.664.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	42.059.984,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	550 orang	21.640.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lamongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	550 orang	21.640.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Kegiatan	454.080.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.976.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	54.606.700,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.565.600,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	166.633.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.022.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	137.275.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah jenis pengadaan	1 kegiatan	223.025.700	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	223.025.700,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah jasa yang menunjang	2 Kegiatan	4.037.732.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	237.092.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.800.640.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah barang yang dipelihara	4 Kegiatan	310.695.641	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	84.995.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	59.803.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	85.873.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.023.341,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lamongan	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan yang Berfungsi	96,43%	26.629.133.319	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ	1 kegiatan	10.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia	2 Kegiatan	25.444.479.288	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	315 Unit	23.781.785.788,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lamongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2169 Unit	1.662.693.500,00	

	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Lamongan	Jumlah terminal penumpang tipe C yang terpelihara	2 Kegiatan	206.486.431	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 unit	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Lamongan	Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		206.486.431,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lamongan	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 kegiatan	170.086.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	170.086.600,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lamongan	Jumlah kendaraan bermotor yang teruji secara berkala	2 Kegiatan	343.310.600	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	25.000.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lamongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	318.310.600,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah peningkatan pelayanan lalu lintas dan ASDP	1 kegiatan	247.545.100	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	247.545.100,00	

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah andalalin yang disetujui	3 Kegiatan	30.497.400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	5.824.600,00	
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Lamongan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	9.907.100,00	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	14.765.700,00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lamongan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terlaksana	1 kegiatan	156.727.900	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	156.727.900,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah angkutan umum yang tersedia	1 kegiatan	20.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	
TOTAL					39.500.088.484,02	

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	82	29.588.463.978,00	Perhubungan	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	82	12.870.955.165,02	16.717.508.812,98		Dinas Perhubungan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	76.117.500,00	Perhubungan	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	117.885.800,00	(41.768.300,00)		Dinas Perhubungan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	30.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	49.364.000,00	- 19.364.000,00		Dinas Perhubungan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	46.117.500,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	68.521.800,00	- 22.404.300,00		Dinas Perhubungan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	29 Laporan	5.406.046.546,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	29 Laporan	7.705.895.324,02	(2.299.848.778,02)		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	5.366.046.546,00	Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	7.643.171.140,02	- 2.277.124.594,02		Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	20.664.200,00	- 5.664.200,00		Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	25.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	42.059.984,00	- 17.059.984,00		Dinas Perhubungan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	550 orang	9.966.000,00	Perhubungan	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	550 orang	21.640.000,00	(11.674.000,00)		Dinas Perhubungan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	-		Dinas Perhubungan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	550 orang	9.966.000,00	Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	550 orang	21.640.000,00	- 11.674.000,00		Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Kegiatan	370.377.100,00	Perhubungan	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Kegiatan	454.080.300,00	(83.703.200,00)		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.000,00	Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.976.900,00	- 9.979.900,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	48.887.700,00	Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	54.606.700,00	- 5.719.000,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.969.300,00	Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.565.600,00	- 15.596.300,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	166.633.600,00	Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	166.633.600,00	-		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.946.000,00	Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.022.000,00	- 5.076.000,00		Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	89.943.500,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	137.275.500,00	- 47.332.000,00		Dinas Perhubungan

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan	1 kegiatan	17.644.800,00	Perhubungan	Jumlah jenis pengadaan	1 kegiatan	223.025.700,00	(205.380.900,00)		Dinas Perhubungan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17.644.800,00	Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	223.025.700,00	- 205.380.900,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang menunjang	2 Kegiatan	23.474.935.632,00	Perhubungan	Jumlah jasa yang menunjang	2 Kegiatan	4.037.732.400,00	19.437.203.232,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	19.268.245.232,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	237.092.000,00	19.031.153.232,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.206.690.400,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.800.640.400,00	406.050.000,00		Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	4 Kegiatan	233.376.400,00	Perhubungan	Jumlah barang yang dipelihara	4 Kegiatan	310.695.641,00	(77.319.241,00)		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	73.193.500,00	Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	84.995.700,00	- 11.802.200,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30.182.900,00	Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	59.803.600,00	- 29.620.700,00		Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	85.873.000,00	- 55.873.000,00		Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.023.341,00	19.976.659,00		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan yang Berfungsi	96,43%	9.871.375.200,00	Perhubungan	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan yang Berfungsi	96,43%	26.629.133.319,00	(16.747.758.119,00)		Dinas Perhubungan
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ	1 kegiatan	-	Perhubungan	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ	1 kegiatan	10.000.000,00			Dinas Perhubungan
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	- 10.000.000,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia	2 Kegiatan	8.640.500.000,00	Perhubungan	Jumlah Perlengkapan jalan yang tersedia	2 Kegiatan	25.444.479.288,00	(16.803.979.288,00)		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	315 Unit	7.409.497.200,00	Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	315 Unit	23.781.785.788,00	- 16.372.288.588,00		Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2169 Unit	1.231.002.800,00	Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2169 Unit	1.662.693.500,00	- 431.690.700,00		Dinas Perhubungan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang tipe C yang terpelihara	2 Kegiatan	25.000.000,00	Perhubungan	Jumlah terminal penumpang tipe C yang terpelihara	2 Kegiatan	206.486.431,00	(181.486.431,00)		Dinas Perhubungan
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 unit	-	Perhubungan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 unit	-	-		Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		25.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		206.486.431,00	- 181.486.431,00		Dinas Perhubungan
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 kegiatan	20.000.000,00	Perhubungan	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 kegiatan	170.086.600,00	(150.086.600,00)		Dinas Perhubungan

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	20.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	170.086.600,00	- 150.086.600,00		Dinas Perhubungan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang teruji secara berkala	2 Kegiatan	200.875.200,00	Perhubungan	Jumlah kendaraan bermotor yang teruji secara berkala	2 Kegiatan	343.310.600,00	(142.435.400,00)		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	59.800.000,00	Perhubungan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	25.000.000,00	34.800.000,00		Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	141.075.200,00	Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	318.310.600,00	- 177.235.400,00		Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pelayanan lalu lintas dan ASDP	1 kegiatan	740.000.000,00	Perhubungan	Jumlah peningkatan pelayanan lalu lintas dan ASDP	1 kegiatan	247.545.100,00	492.454.900,00		Dinas Perhubungan
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	740.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	247.545.100,00	492.454.900,00		Dinas Perhubungan
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin yang disetujui	3 Kegiatan	35.000.000,00	Perhubungan	Jumlah andalalin yang disetujui	3 Kegiatan	30.497.400,00	4.502.600,00		Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	10.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	5.824.600,00	4.175.400,00		Dinas Perhubungan
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	10.000.000,00	Perhubungan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	9.907.100,00	92.900,00		Dinas Perhubungan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	15.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	14.765.700,00	234.300,00		Dinas Perhubungan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terlaksana	1 kegiatan	200.000.000,00	Perhubungan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terlaksana	1 kegiatan	156.727.900,00	43.272.100,00		Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	200.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	156.727.900,00	43.272.100,00		Dinas Perhubungan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia	1 kegiatan	10.000.000,00	Perhubungan	Jumlah angkutan umum yang tersedia	1 kegiatan	20.000.000,00	(10.000.000,00)		Dinas Perhubungan
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	- 10.000.000,00		Dinas Perhubungan
				39.459.839.178,00				39.500.088.484,02			

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. DIANTO HARI WIBOWO,MIP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002